

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR
PELAKU PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK KANDUNGNYA
(Studi kasus putusan pengadilan negeri No. 3175/Pid.B/2010/PN. SBY)**

SKRIPSI



Oleh :

**ACHMAD JUNAEDI
NPM. 0671010109**

**YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2012**

LEMBAR PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR
PELAKU PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK KANDUNGNYA
(STUDI KASUS PUTUSAN PN. NO. 3175/Pid.B/2010/PN.SBY)

Oleh:
ACHMAD JUNAEDI
NPM. 0671010109

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi
Menyetujui,

Pembimbing Utama

Hariyo Sulistiyantoro, S.H, MM
NIP. 196206251991031001

Mengetahui
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro, S.H, MM
NIP. 196206251991031001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR
PELAKU PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK KANDUNGNYA
(STUDI KASUS PUTUSAN PN. NO. 3175/Pid.B/2010/PN.SBY)

Oleh:
ACHMAD JUNAEDI
NPM. 0671010109

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada tanggal 13 Juni 2012

Pembimbing Utama:

Tim Penguji :
1.

Hariyo Sulistiyantoro, SH, MM
NIP. 196206251991031001

Sutrisno S.H M.Hum
NIP.19601212198031001
2.

Subani S.H M.Si
NIP. 195105041983031001
3.

Hariyo Sulistiyantoro, S.H, MM
NIP.196206251991031001

Mengetahui :
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro, S.H, MM
NIP.196206251991031001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Junaedi
Tempat/ tanggal lahir : Surabaya, 20 Juni 1986
Npm : 0671010109
Kosentrasi : Pidana
Alamat : Kalimas Madya IIIA No.10 Surabaya

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya yang berjudul: “PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR PELAKU PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK KANDUNGNYA (STUDI KASUS PUTUSAN PN. NO. 3175/Pid.B/2010/PN.SBY)” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar asli karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila kemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini yang saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui
2012 Pembimbing utama

Surabaya, 13 Juni
Penulis

Hariyo Sulistiyantoro, S.H, MM
Nip: 196206251991031001

Achmad Junaedi
Npm: 0671010109

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran ALLAH SWT atas berkat dan rahmat-Nya melimpahkan kekuatan lahir dan kemampuan berfikir. Sholawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang mengikuti jejaknya.

Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Anak Dibawah Umur Pelaku Pembunuhan Terhadap Anak Kandungnya” ini juga tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dapat mempengaruhi kelancaran penulisan skripsi ini. Keberhasilan penulisan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Hariyo Sulistiyantoro S.H MM selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur. Dan selaku pembimbing I skripsi yang selalu banyak memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Sutrisno S.H M.Hum selaku Wedek I Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Drs. EC Gendut Sukarno MS selaku Wadek II Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Subani S.H M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

7. Orang tua yang telah memberikan dukungan moral, doa dan pengorbanan yang begitu besar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan .
8. Adik dan saudara yang selalu mendoakan untuk keberhasilanku.
9. Apri nur dihani yang selalu memberikan spirit, kasih sayang serta doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman Fakultas Hukum yang banyak memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung telah membantu penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun juga sangat diharapkan demi kesempurnaannya, dan penulis juga berharap agar skripsi ini dapat memberikan sedikit pengetahuan dalam perkembangan hukum di negara Indonesia.

Surabaya, jun 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Kajian Pustaka	5
1.6. Metodologi Penelitian	29
1.7. Sistematika Penulisan	31
 BAB II PERTANGGUNGJAWABAN ATAS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK KANDUNGNYA SENDIRI	 33 33
2.1. Tindak Pidana	35
2.2. Tindak Pidana Pembunuhan	

	2.3. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Anak Kandungnya	41
BAB III	PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA	48
	3.1. Tugas Hakim Dalam Memutuskan Perkara.	
	3.2. Pertimbangan Yuridis dan Pertimbangan Non Yuridis Serta Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan Penjatuhan Pidana	57 66
BAB IV	PENUTUP	66
	4.1. Kesimpulan	67
	4.2. Saran	
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA
TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama : Sumadi Purwalaksana
Npm : 0871010005
Tempat Tanggal Lahir : Makassar, 14 Januari 1989
Program Study : Pidana
Judul Skripsi :

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN MAL PRAKTEK YANG
DILAKUKAN OLEH DOKTER

ABSTRAKSI

Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban mal praktek yang dilakukan oleh dokter dan pertanggung jawaban hukum bagi dokter yang melakukan mal praktek. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sumber data diperoleh dari literatur, Undang-undang dan wawancara terhadap korban dan pakar hukum pidana, analisa data yang digunakan menggunakan data deskriptif analisis yaitu mengkaji fakta social yang timbul di masyarakat, hasil penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi korban mal praktek merupakan tanggung jawab penuh bagi pelaku mal praktek dalam hal ini adalah dokter. Bentuk dari perlindungan hukum yang diberikan kepada korban mal praktek berupa ganti kerugian, baik ganti kerugian berupa materiil maupun immateriil. Sedangkan seorang dokter dapat dimintai pertanggung jawaban pidana dalam tiga macam kategori yaitu, mal praktek yang disebabkan atas kesalahan, mal praktek yang disebabkan atas kelalaian, dan mal praktek yang disebabkan atas kesengajaan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Bagi Korban Mal Praktek, Mal Praktek,
Dokter

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pengaruh perkembangan teknologi sangat dirasakan sekali tidak hanya kaum intelektual dan dewasa, melainkan juga anak-anak. Hal ini didukung oleh sarana dan prasarana yang ada. Awalnya orang hanya mengenal teknologi informatika melalui radio, berkembang ke televisi dan akhirnya telephon sellluler di mana tidak hanya dimiliki oleh orang-orang dewasa saja melainkan termasuk anak-anak dapat dengan mudah mengoperasikan telephon sellluler. telephon sellluler dengan sarana kecanggihannya berisi program-program di antaranya banyak dijumpai file-file yang mengarah pada pornografi, sehingga sering didengar anak-anak melakukan tindakan perkosaan atau pencabulan sesama anak.

Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (LNRI Tahun 2002 Nomor 109; TLNRI Nomor 4235) (selanjutnya disingkat UU No. 23/2002) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sebagai seorang anak yang berarti belum mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, padahal anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut,

maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Anak yang belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, maka dalam segala hal anak perlu mendapatkan perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana Pasal 1 angka 15 UU No. 23/2002.

Ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No. 23/2002 mengenai anak yang mendapatkan perlindungan khusus, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai hukum yang dihadapi oleh anak tersebut, apakah hukum perdata atau hukum pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum dalam lingkup hukum pidana, anak tersebut disebut anak nakal; atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan sebagaimana Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak (LNRI Tahun 1997 No. 3; TLNRI No. 3668) (selanjutnya disebut UU No. 3/1997).

Anak meskipun nakal masih perlu mendapatkan perlindungan khusus yang tidak diberikan kepada pelaku tindak pidana orang dewasa. Terhadap anak nakal menurut Pasal 22 UU No. 3/1997 “hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam Undang-undang ini”. Kata “hanya dapat” menunjukkan bahwa setiap anak nakal, maka ada dua kemungkinan sanksi yang dijatuhkan yaitu sanksi pidana penjara atau berupa tindakan. Pidana pada umumnya dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana pokok di antaranya pidana mati; pidana penjara; pidana kurungan; pidana denda; pidana tutupan. Pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu; perampasan barang-barang tertentu; pengumuman putusan hakim. Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal menurut pasal 24 UU No. 3 Tahun 1997 ialah a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Dibahasnya mengenai anak nakal ini ada kaitannya dengan dibebaskannya oleh Pengadilan Negeri Surabaya dalam memeriksa salah seorang siswi kelas 1 (satu) Sekolah Menengah Atas 12 Surabaya yang terbukti melahirkan seorang anak dan kemudian anak tersebut dibunuh. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya membebaskan anak nakal tersebut dengan pertimbangan hukum bahwa aksi

pembunuhan yang dilakukan AD terhadap bayinya sendiri dan membuang mayatnya di toilet SMAN 12 Surabaya pada Juli 2010 lalu, dikarenakan terdakwa saat itu kejiwaan labil, sehingga AD sebagai korban pemerkosaan hingga mengandung dan lahirnya bayi tersebut.

Saat itu AD mengaku bayi yang ada dalam kandungannya adalah buah dari perkosaan yang dilakukan RM yang kini buron. Perbuatan AD tersebut di dalam UU No. 3 Tahun 1997 disebut sebagai anak nakal dan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002) disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum.

Di dalam pasal 341 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) menentukan sebagai berikut: “Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut UU No.

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dari sudut pandang UU No. 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Sebagai masukan yang berkaitan dengan pihak-pihak yang terlibat terutama pengadilan dalam memberikan putusan khususnya putusan kepada anak pelaku tindak pidana pembunuhan.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan

anak.¹ Arif Gosita mengartikan perlindungan anak sebagai berikut: “Hukum perlindungan anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya”.² Perlindungan hukum terhadap anak diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya:

1.5.1.1. Menurut Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Anak juga mempunyai hak atas kesejahteraan sebagaimana diatur dalam UU No. 4 Tahun 1979. anak menurut UU No. 4/1979 adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin, jadi batasan pengertian anak dalam kaitannya dengan kesejahteraan anak yaitu sejak anak ada dalam kandungan sampai berusia 21 tahun. Kesejahteraan anak menurut Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No. 4/1979 adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Sebagai seorang anak tentunya belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri yang berhubungan dengan kesejahteraan tersebut, untuk itu diperlukan usaha kesejahteraan anak menurut Pasal 1 ayat (1) huruf b UU No. 4/1979 adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya Kesejahteraan Anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, h. 33.

² Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1984. , h. 53.

Anak dan kesejahteraan anak ini ada kaitannya dengan kondisi anak dan masa depannya, karena anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Oleh karenanya agar setiap anak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Di dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi. Pemeliharaan kesejahteraan anak belum dapat dilaksanakan oleh anak sendiri.

Anak tidak jarang melakukan suatu perbuatan yang menyimpang dari sebagaimana anak seusianya. Melakukan perbuatan menyimpang yang berarti anak tersebut mengalami masalah, menurut Pasal 1 angka 8 UU No. 4/1979, bahwa anak yang mengalami masalah kelakuan adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat. Perlakuan menyimpang dari norma-norma masyarakat dikategorikan sebagai anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Meskipun demikian anak yang melakukan perbuatan menyimpang dari norma-norma hukum tersebut berhak untuk mendapatkan hak-haknya di antaranya hak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 4/1979.

1.5.1.2. Menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Pembinaan terhadap anak diperlukan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan baik fisik, mental maupun sosial untuk itu anak haruslah diberikan suatu kebebasan, penahanan anak dan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi menjadikan perkembangan anak terhambat, sehingga anak tidak dapat tumbuh dan berkembang baik fisik, mental, dan sosial sebagaimana layaknya seorang anak.

Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum dalam arti hukum publik tidak memandang status sosial dalam arti baik anak orang yang status ekonomi orang tuanya mapan yang serba kekurangan. Di

samping itu, terdapat pula anak, yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, maupun sosial. Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya dan atau masyarakat.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak sebagaimana Penjelasan Umum UU No. 3/1997.

Anak pada umumnya jiwa masih labil, belum mampu membedakan mana yang baik dan mana yang jelek, mana yang diperkenankan oleh undang-undangan maupun yang melanggar undang-undang. Perilaku anak tercipta dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua sangat mempengaruhi perubahan anak dalam perkembangannya.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku Anak Nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan

sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah Anak Nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut.

Hubungan antara orang tua dengan anaknya merupakan suatu hubungan yang hakiki, baik hubungan psikologis maupun mental spiritualnya. Mengingat ciri dan sifat anak yang khas tersebut, maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap Anak Nakal diusahakan agar anak dimaksud jangan dipisahkan dari orang tuanya. Apabila karena hubungan antara orang tua dan anak kurang baik, atau karena sifat perbuatannya sangat merugikan masyarakat sehingga perlu memisahkan anak dari orang tuanya, hendaklah tetap dipertimbangkan bahwa pemisahan tersebut semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara sehat dan wajar.

Demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya. Dalam hubungan ini pengaturan pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang lama pelaksanaan penahanannya ditentukan sesuai dengan kepentingan anak dan pembedaan ancaman pidana bagi anak yang ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang penjatuhan pidananya ditentukan 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam Undang-undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada Negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Pembedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka perkara Anak Nakal, wajib disidangkan pada Pengadilan Anak yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian, proses peradilan perkara Anak Nakal dari sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan selanjutnya, wajib dilakukan oleh pejabat khusus Polisi Anak, Jasa Anak dan Hakim anak yang benar-benar memahami masalah anak.

Dalam penyelesaian perkara Anak Nakal, Hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dihimpun oleh Pembimbing Kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan demi kepentingan anak. Apabila tidak mempertimbangkan

maka putusannya batal demi hukum. Dengan adanya hasil laporan tersebut, diharapkan Hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan.

Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan, oleh sebab itu Hakim harus yakin benar, bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara. Untuk lebih memantapkan upaya pembinaan dan pemberian bimbingan bagi Anak Nakal yang telah diputus oleh Hakim, maka anak tersebut ditampung di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Berbagai pertimbangan tersebut di atas serta dalam rangka mewujudkan peradilan yang memperhatikan perlindungan dan kepentingan anak dan kesejahteraan anak, maka perlu diatur ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan yang khusus bagi anak dalam lingkungan Peradilan Umum, yaitu adanya Pengadilan Anak yang diharapkan memberikan arah yang tepat dalam pembinaan dan perlindungan terhadap anak.

1.5.1.3. Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang

dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa anak meskipun melakukan tindak pidana dalam hal ini melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang baru dilahirkan, anak tetap mendapatkan perlindungan khusus atas perbuatannya menghilangkan nyawa anak yang baru dilahirkannya tersebut. Perlindungan terhadap anak diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

1.5.2. Penanganan Anak yang Sesuai Dengan Sifat Anak

Perlakuan penanganan berbeda umumnya adalah antara anak dengan orang dewasa, namun sebenarnya perlakuan berbeda juga pada anak, karena perbedaan budaya dan kondisi masyarakat, yang turut mempengaruhi perbedaan penggunaan batas umur minimum dan maksimum dalam hukum positif di suatu negara. Adanya perbedaan sedemikian, mencerminkan pula bervariasinya kematangan pribadi dan pemikiran anak-anak di suatu negara dengan di negara-negara lainnya. Penentuan batas umur tertentu yang digunakan, berarti mengambil ukuran rata-rata kematangan pribadi dan pemikiran anak-anak umumnya pada usia tersebut, di negara tertentu. Dalam konteks ini, penekannya adalah pada unsur kesamaan dalam diri anak. Sedangkan perbedaan yang bersifat lebih pribadi, eksistensinya beroleh pengakuan, seperti tercermin dalam gagasan tentang "individualized justice" yang diintroduksi oleh Rescoe Pound. Konsep ini

mengingatkan adanya kekhususan yang bersifat perorangan dalam diri anak sehingga menuntut kejadian yang terindividualisasi pula.

Perlakuan berbeda antara penanganan anak dengan orang dewasa nampak dalam memeriksa perkara anak nakal di sidang pengadilan, hakim dalam memeriksa anak nakal dapat menjatuhkan pidana dan tindakan sebagaimana Pasal 22 UU No. 3 Tahun 1997 menentukan bahwa:

Terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana dan tindakan yang ditentukan dalam Undang-undang ini”. Dinyatakan pula, jika anak nakal tidak ditangani secara baik/tepat, tidak mustahil kondisinya di masa kini akan menjerumuskannya menjadi penjahat (adult criminal), di masa mendatang Gejala yang serius dari “kenakalan anak” dapat menjadi indikator bahwa, pelakunya berpotensi menjadi “anak nakal”.³

Anak nakal jika oleh hakim dalam putusannya tidak dijatuhi pidana melainkan tindakan, menunjukkan bahwa anak memperoleh perlindungan tersendiri berbeda dengan yang dilakukan oleh orang dewasa.

Memperhatikan hal sebagaimana di atas dapat dijelaskan bahwa UU No. 3 Tahun 1997 memberikan perlindungan kepada anak nakal, namun perlindungan tersebut didapat anak melalui prosedur sidang pengadilan, sehingga tidak lepas dari proses persidangan, padahal dalam pemeriksaan di kepolisian (penyidikan) pihak kepolisian dapat memberikan kebijakan dengan memberikan diskresi kepada anak, diskresi sesuai dengan Penjelasan Umum UU No. 2 Tahun 2002 dijelaskan sebagai berikut:

Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam Undang-Undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan

³Tilly AA. Rampen, Antisipasi Kendala Dalam Penerapan Ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, (selanjutnya disebut Tilly 2), Yuridika, No 5 & 6, September – Desember 1997.

penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pembuat perbuatan pidana (dader) baik perbuatan kejahatan maupun pelanggaran atas delik. Menurut Moeljatno dikemukakan sebagai berikut:

Kejahatan atau “rechtsdeleten” adalah perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, sedangkan pelanggaran atau “wetsdeliktern” yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian.⁴

Pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana jika memenuhi keseluruhan unsur-unsur pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggung jawabkan pidana. Sedangkan jika pelaku tidak memenuhi salah satu unsur mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dipidana. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

- 1) melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana;
- 2) untuk adanya pidana harus mampu bertanggungjawab;
- 3) mempunyai suatu bentuk kesalahan;
- 4) tidak adanya alasan pemaaf.⁵

Ad. 1. Melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana. Unsur pertanggungjawaban pidana dalam bentuk melakukan perbuatan melawan hukum

⁴ Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1983, h. 71.

⁵ Ibid., h. 164.

“wederrechtelijkheid” sebagai syarat mutlak dari tiap-tiap melakukan perbuatan pidana.

Sifat melawan hukum dari tindak pidana yang terdapat pada KUHP merumuskan delik tersebut secara tertulis dan juga tidak tertulis. Jika rumusan delik tidak mencantumkan adanya sifat melawan hukum suatu perbuatan pidana, maka unsur delik tersebut dianggap dengan diam-diam telah ada, kecuali jika pelaku perbuatan dapat membuktikan tidak adanya sifat melawan hukum tersebut.⁶ Perihal sifat melawan hukum dibedakan antara sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum formil, maksudnya “semua bagian yang tertulis dalam rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana).”⁷ Sedangkan sifat melawan hukum materiil maksudnya “melanggar atau membahayakan kepentingan umum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.”⁸

Ad. 2. Untuk adanya pidana harus mampu bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur yang diwajibkan guna memenuhi pertanggungjawaban suatu perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, yang menjadi dasar adanya kemampuan bertanggungjawab adalah:

- 1) kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;

⁶ Ibid., h. 134.

⁷ Sahetapy, Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta, 2003, h. 39.

⁸ Ibid.

- 2) kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.⁹

Sedangkan batasan-batasan mengenai perbuatan pidana (dader) dianggap tidak mampu bertanggungjawab menurut KUHP adalah:

- 1) kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP);
- 2) anak yang belum dewasa (Pasal 45 KUHP).

Dengan dasar ketentuan KUHP tersebut di atas, maka perbuatan pidana (dader) tidak termasuk mempunyai pertanggungjawaban pidana dalam melakukan perbuatan pidana.

Ad. 3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan. Perbuatan manusia dianggap mempunyai kesalahan atau “schuld” merupakan bagian dari unsur pertanggungjawaban pidana. Asas yang dipergunakan dalam pertanggungjawaban pidana yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (geen straf zonder schuld; actus non fasit reum nisi mens sit rea). Menurut Moeljatno, perbuatan manusia dianggap mempunyai kesalahan jika:

Orang dikatakan mempunyai kesalahan jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat tercela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian¹⁰

Sedangkan menurut Simon sebagaimana dikutip dari bukunya Moeljatno, kesalahan adalah “keadaan psychis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan

⁹Moeljatno, Op. cit.,h. 165.

¹⁰ Ibid., h. 157.

yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat tercela karena melakukan perbuatan tadi”.¹¹

Pertanggungjawaban pidana seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dibatalkan demi hukum jika terdapat alasan pemaaf atau “verontschuldigingsgrond”. Alasan pemaaf menurut teori hukum adalah alasan yang menghapus kesalahan. Menurut Moeljatno kalau ada alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan (alasan pemaaf), maka masih ada perbuatan pidana, tetapi orangnya tidak dipidana (tidak dapat dipertanggungjawabkan). Dampak yang terjadi akibat adanya alasan pemaaf bagi seseorang yang melakukan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Menurut Andi Zainal Abidin mengemukakan sebagai berikut: “Ketidakmampuan bertanggungjawab menghapuskan kesalahan dalam arti luas dan oleh karena itu termasuk alasan pemaaf”.¹²

Ad. 4. Tidak adanya alasan pemaaf. Menurut Sudarto, alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawab-kannya seseorang atau tidak dipidananya, karena 2 hal:

Perbuatan meskipun telah mencocoki rumusan delik, namun tidak merupakan suatu tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum (ingat ajaran sifat melawan hukum yang formil dan materiil); meskipun perbuatannya itu dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana, namun orangnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena padanya tidak ada kesalahan.¹³

¹¹ Ibid., h. 168.

¹² Andi Zainal Abidin, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1997, h. 223.

¹³ Sudarto dan Wonosusanto, *Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, Program Kekhususan Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Surakarta, 1987, h. 1.

Berhubung adanya dua hal di atas, maka ilmu pengetahuan hukum pidana membedakan adanya: alasan pembenar, dan alasan pemaaf.¹⁴

Mengenai alasan pembenar dan pemaaf, sebenarnya perbedaan ini tidak penting bagi pembuat sendiri, karena jika ternyata ada alasan penghapusan pidana, maka teranglah tidak akan dipidana.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana anak atau anak nakal dalam hal ini anak jalanan secara umum diatur dalam Pasal 45 KUHP, yang menentukan sebagai berikut:

Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan:

memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal-Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

Namun keberadaan Pasal 45 KUHP tersebut telah di amandemen dengan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Perihal perlunya anak nakal mendapatkan perlindungan hukum, tidak lepas dari upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-

¹⁴ Ibid., h. 2.

undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan. dalam kaitannya dengan penindakan anak nakal.

Anak nakal dalam hal ini anak jalanan yang melakukan tindak pidana pencabulan dapat dikenakan sanksi pidana maupun tindakan. Sebagaimana Pasal 22 UU No. 3 Tahun 1997 menentukan bahwa:

Terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana dan tindakan yang ditentukan dalam Undang-undang ini”. Dinyatakan pula, jika anak nakal tidak ditangani secara baik/tepat, tidak mustahil kondisinya di masa kini akan menjerumuskannya menjadi penjahat (adult criminal), di masa mendatang Gejala yang serius dari “kenakalan anak” dapat menjadi indikator bahwa, pelakunya berpotensi menjadi “anak nakal”.

Perihal sanksi yang dijatuhkan kepada anak nakal, pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengajukan uji materiil atas UU No. 3 Tahun 1997 Penjatuhan Pidana terhadap anak berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

- Terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang pengadilan Anak tidak ada perubahan

- Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
- Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:
 - a. pidana penjara;
 - b. pidana kurungan;
 - c. pidana denda; atau
 - d. pidana pengawasan.
- Pidana tambahan dapat dijatuhkan yaitu berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi. (Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah)
- Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:
 - a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, orangtua asuh;
 - b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
 - c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Penjatuhan tersebut dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.

Jadi sanksi yang diberikan kepada anak nakal tersebut tidak hanya sanksi pidana penjara dan tindakan sebagaimana Pasal 22 UU No. 3 Tahun 1997 melainkan ditambah dengan pidana kurungan.

Memperhatikan pembahasan di atas dapat dijelaskan bahwa terjadi suatu perbedaan penyelesaian terhadap anak nakal ditinjau dari UU No. 3 Tahun 1997 dengan UU No. 23 Tahun 2002. Perbedaan tersebut sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan, karena ruang lingkup UU No. 3 Tahun 1997 dalam kaitannya dengan penindakan terhadap anak nakal, sedangkan dalam UU No. 23 Tahun 2002 mengatur perlindungan anak secara menyeluruh dalam arti suatu pencegahan agar orang tuanya memperhatikan terhadap anak-anaknya agar tidak menjadikan anak nakal. Jika anak nakal terbukti melakukan tindak pidana, perlakuan khusus perlu dilakukan terhadap anak agar anak tetap mampu

mengembangkan jiwa, kepribadian dan sosialnya, penjara merupakan alternatif terakhir terhadap anak.

Anak yang melakukan perbuatan menyimpang atau anak yang melakukan tindak pidana berupa penyalahgunaan napza, dapat diajukan ke sidang pengadilan. Batasan umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang pengadilan, menurut Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997, menentukan sebagai berikut: “Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

Mengenai perlakuan khusus terhadap anak nakal, nampak pada sidang pengadilan di mana para penegak hukum tidak memakai toga atau pakaian dinas, dengan tujuan agar anak tidak merasa takut dan dia merasa dalam lingkungan kekeluargaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU No. 3 Tahun 1997 yang menentukan bahwa: “Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penasihat Hukum, serta petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas”. Dalam pemeriksaan sidang pengadilan anak Pasal 8 UU No. 3 Tahun 1997 menentukan:

- (1) Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup;
- (2) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu pemeriksaan perkara anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam sidang terbuka;
- (3) Dalam sidang pengadilan yang dilakukan secara tertutup hanya dapat dihadiri oleh anak yang bersangkutan beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh. Penasehat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Sedangkan pemeriksaan terhadap pelaku anak dilakukan dalam sidang tertutup tujuannya untuk melindungi kepentingan anak, agar anak-anak tidak

dipublikasikan oleh pers, karena jika sampai identitas anak dan perkaranya dimuat pada mass media, maka akan menyebabkan trauma bagi anak dikemudian hari, dan secara psikologis akan mempengaruhi perkembangan diri si anak yang pada akhirnya berakibat anak tersebut akan dikucilkan oleh teman-temannya.

Mengenai tatacara persidangan terhadap pelaku tindak pidana anak, Pasal 11 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 menentukan:

- (1) Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama sebagai hakim tunggal;
- (2) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis;
- (3) Hakim dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Panitera atau seorang Panitera Pengganti.

Pemeriksaan sidang harus dilakukan secara terbuka, kecuali pemeriksaan sidang perkara anak dan hal-hal yang berkaitan dengan kesusilaan harus dilakukan secara tertutup, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 153 ayat (3) KUHP, menentukan bahwa untuk keperluan pemeriksaan Hakim Ketua Sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak.

Meskipun sebagai anak nakal yang telah terbukti melakukan kesalahan, hak-hak anak tetap diperhatikan, dengan menempatkan anak dalam suatu lembaga pemasyarakatan dalam arti anak dapat dijatuhi pidana penjara. Anak yang diletakkan dalam lembaga pemasyarakatan tetap akan memperoleh pelayanan asuhan sebagaimana layaknya seorang anak. Hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1979, yang menentukan bahwa:

1. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya;

2. Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

Jadi meskipun berdasarkan keputusan hakim yang menyatakan anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, anak tersebut tetap memperoleh pelayanan dan asuhan. Pemberian pelayanan yang demikian bertujuan untuk menolong anak agar dapat mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangan anak, karena anak adalah generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Darwan Prinst mengemukakan: “Untuk itu anak perlu dihindari dari tindak pidana yang dapat mem-pengaruhi perkembangan fisik, mental dan rohaninya tersebut”.¹⁵

Perlakuan istimewa terhadap anak ini juga nampak dalam memeriksa perkara anak nakal, hakim dapat menjatuhkan pidana dan tindakan sebagaimana Pasal 22 UU No. 3 Tahun 1997 menentukan bahwa: “Terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana dan tindakan yang ditentukan dalam Undang-undang ini”.

Penjatuhan berupa tindakan tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 menentukan:

Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:

- a. mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh;
- b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, atau

¹⁵ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 99.

- c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan atau latihan kerja.

Perihal sanksi berupa pidana menurut Pasal 10 KUHP terdiri dari:

- a. Pidana pokok:
 - 1. Pidana mati
 - 2. Pidana penjara
 - 3. Pidana kurungan
 - 4. Pidana denda.
- b. Pidana tambahan:
 - 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2. Perampasan barang-barang tertentu
 - 3. Pengumuman putusan hakim.

Namun jika pelakunya seorang anak, maka sanksi berupa pidananya tertuang di dalam Pasal 23 ayat (1), (2) dan (3) No. 3 Tahun 1997 menentukan:

- (1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:
 - a. pidana penjara;
 - b. pidana kurungan;
 - c. pidana denda, atau
 - d. pidana pengawasan.
- (3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

Perihal pidana pokok berupa pidana mati sebagaimana tertuang dalam KUHP tidak dapat dijatuhkan terhadap Anak Nakal sesuai dengan Pasal 26 (2) UU No. 3 Tahun 1997 yang menentukan bahwa: “Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun”.

Anak nakal jika oleh hakim dalam putusannya tidak dijatuhi pidana melainkan tindakan, menunjukkan bahwa anak memperoleh perlindungan tersendiri berbeda dengan yang dilakukan oleh orang dewasa.

Anak-anak meskipun dalam putusan pengadilan dijatuhi pidana penjara sebagaimana Pasal 37 Konvensi Hak-hak Anak, anak harus tetap memperoleh jaminan dan perlindungan sebagai berikut:

Negara-negara peserta akan menjamin bahwa:

- a. Tak seorang anakpun boleh menjalani siksaan atau perlakuan yang kejam, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat. Hukuman mati dan hukuman seumur hidup tidak akan dijatuhkan tanpa kemungkinan pembebasan untuk kejahatan yang dilakukan oleh anak;
- b. Tidak seorang anakpun dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau penghukuman seorang anak harus sesuai dengan hukum dan akan diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang paling pendek;
- c. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan perlakuan secara manusiawi dan dihormati martabat kemanusiaannya. Khususnya, setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisahkan dari orang-orang dewasa kecuali bila dianggap bahwa tidak melakukan hal ini merupakan kepentingan terbaik dari anak yang bersangkutan dan ia berhak untuk mengadakan hubungan dengan keluarganya melalui surat menyurat atau kunjungan-kunjungan, aman dalam keadaan-keadaan khusus.

Dengan demikian, meskipun seorang anak disangka atau dituduh telah melakukan suatu tindak pidana, perhatian terhadap harkat dan martabat anak tetap diutamakan, sejalan dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (4) Konvensi Hak-hak anak, menentukan:

- (1) Negara-negara peserta mengakui hak setiap anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar hukum pidana diperlukan sesuai martabat dan nilai-nilai anak, memperkuat penghargaan anak pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar dari orang lain dengan memperhatikan usia anak dan hasrat untuk meningkatkan penyatuan kembali atau reintegrasi anak dan meningkatkan peran yang konstruktif dari anak dalam masyarakat.

- (4) Berbagai pengaturan seperti pemeliharaan, pembinaan dan peraturan pengawasan, pemberian nasehat, masa percobaan, pemeliharaan anak angkat, program-program pendidikan dan pelatihan kejuruan dan alternatif lain untuk lembaga pemeliharaan anak angkat, akan diadakan guna menjamin bahwa anak-anak akan ditangani dengan cara yang layak bagi kehidupan mereka seimbang baik dengan keadaan mereka maupun pelanggaran yang dilakukan.

Mengenai ketentuan Pasal 40 Konvensi Hak-hak Anak sebagaimana di atas dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasannya sebagai berikut:

Hak bagi anak-anak yang didakwa ataupun diputuskan telah melakukan pelanggaran untuk tetap dihargai hak asasinya dan khususnya, untuk menerima manfaat dari segenap aspek proses hukum, termasuk bantuan hukum atas bantuan lainnya dalam penyiapan dan pengajuan pembelaan mereka. Prinsip demi hukum dan penempatan institusional sedapat mungkin harus dihindari.

Perihal aspek perlindungan hukum terhadap anak, Muhammad Joni mengemukakan: “Sistem hukum perlindungan anak masih menampilkan kesenjangan dan kekosongan hukum mengenai anak dan hak-hak anak dan masih belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam norma hukum positif dan belum maksimalnya penegakan hukum anak”.¹⁶

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dijelaskan bahwa jika seorang anak terbukti menyalahgunakan napza, maka dapat dikualifikasikan sebagai anak nakal. Meskipun sebagai anak nakal yaitu anak melakukan tindak pidana (melakukan pencabulan) anak mendapat perlakuan yang berbeda jika dibandingkan dengan pelaku tindak pidana pencabulan orang dewasa. Perlakuan istimewa terutama dalam hal penjatuhan pidana, anak nakal diharapkan pidana yang dijatuhkan berupa tindakan jika anak dijatuhi pidana penjara, pidana yang dijatuhkan yaitu

¹⁶ Muhammad Joni, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 5.

maksimal 1/3 dari pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan napza oleh orang dewasa. Terhadap orang tua yang kurang memperhatikan anak-anaknya sehingga menjadi anak nakal, kekuasaannya sebagai orang tua dicabut dengan alasan telah melalaikan kewajibannya sebagai orang tua terhadap anak. Meskipun demikian anak nakal tersebut diusahakan untuk tidak dijatuhi pidana penjara, sebagaimana Pasal 16 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 anak nakal hanya dijatuhi pidana jika tidak ada alternatif yang lain, maksudnya bahwa penjatuhan pidana terhadap anak nakal hanyalah merupakan alternatif terakhir.

Berdasarkan pembahasan sebagaimana tersebut di atas berkaitan dengan perlindungan khusus terhadap anak nakal menurut peraturan perundang-undangan dapat dijelaskan bahwa apabila anak tersebut dalam persidangan tertutup terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana terhadap anak yang dilahirkan, maka dapat dijelaskan bahwa terhadap anak tersebut dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara, tindakan atau hukuman kurungan.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan permasalahan secara statute approach dan conceptual approach¹⁷. Statute approach, artinya pendekatan terhadap masalah yang diajukan didasarkan

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenana Media Group, Jakarta, h. 96.

pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan Conceptual approach artinya pendekatan permasalahan berdasarkan konsep-konsep hukum.

1.6.2. Sumber Data

- Data primer, yaitu data yang bersifat mengikat, berupa peraturan perundang-undangan dalam hal ini KUHP.
- Data sekunder, yaitu data yang erat kaitannya dengan data primer, karena bersifat menjelaskan, yang dapat membantu menganalisis dan memahami data primer, terdiri dari literatur maupun karya ilmiah para sarjana.¹⁸

1.6.3. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan cara membaca, mempelajari dan mengidentifikasinya seluruh data baik berupa peraturan perundang-undangan yaitu KUHP maupun pendapat para sarjana, kemudian data tersebut diolah dengan cara dipilah-pilah dari data yang bersifat umum kemudian disimpulkan menjadi khusus, sehingga diperoleh data yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini.

1.6.4. Metode Analisis Data

Langkah pengumpulan data dalam tulisan ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu diawali dengan inventarisasi semua data yang terkait dengan

¹⁸Ibid, h. 97

pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi data yang terkait dan selanjutnya data tersebut disusun secara sistematis untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya.

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dalam hal ini KUHP dan literatur, yang kemudian dipakai sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis dalam arti mengkaitkan pengertian antara KUHP serta pendapat para sarjana.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam skripsi ini dibagi dalam 4 (empat) bab, yang masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab, sebagai berikut:

Sistematika skripsi ini diawali Bab pertama, Pendahuluan, berisikan gambaran umum permasalahan, yang merupakan pengantar pembahasan pada bab berikutnya. Sub babnya terdiri atas Latar Belakang Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua dengan judul bab pertanggungjawaban pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bab ini dipaparkan untuk menjawab permasalahan pertama yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bab ketiga dengan judul bab Putusan bebas Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Pelaku Pembunuhan Anak Yang Divonis Bersalah. Bab ini dipaparkan untuk menjawab permasalahan kedua bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang membebaskan pelaku tindak pidana yang melakukan pembunuhan terhadap anak yang baru dilahirkan, padahal dalam pertimbangan hukumnya anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

Bab keempat adalah bagian terakhir dari usulan penelitian skripsi yang berisi Kesimpulan dan Saran.